

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata pada masa ini merupakan kebutuhan yang sangat mutlak dibutuhkan setiap orang. Perkembangan zaman dengan diikuti rutinitas pekerjaan yang sangat melelahkan menyebabkan masyarakat tidak menyia-nyiaikan waktu luang yang dimilikinya untuk segera bergegas melakukan kegiatan dengan berwisata ke suatu tempat. Pada tahun 2019, angka kedatangan wisatawan mancanegara secara global telah mencapai 1,46 miliar kunjungan, meningkat sebanyak 3,8 persen dari tahun sebelumnya (Katadata.co.id, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang rela meninggalkan rumah dan pekerjaannya sejenak untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan menghabiskan waktu luang (*leisure*). Situasi ini menunjukkan bahwa pariwisata dijadikan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan dalam menghilangkan rasa stress, penat, dan lelah akibat rutinitas yang begitu padat.

Sebagai salah satu negara kepulauan di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran industri kepariwisataan. Pada tahun 2018, menurut The World Travel & Tourism Council (WTTC), kekuatan pariwisata Indonesia ditempatkan dalam 10 besar dunia, tepatnya peringkat sembilan (Merdeka.com, 2019). Tentu tidak salah apabila hal ini dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa pariwisata menjadi sektor unggulan di Indonesia. Potensi ini jelas akan mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi kemajuan perekonomian negara dan masyarakatnya, serta diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Susetyarini (2017), dalam (Pendit 1994:4) yang menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu jenis dari industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya seperti; industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Kondisi pariwisata di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019, tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu 16,1 juta orang, sedangkan pada tahun 2018 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,8 juta orang. Untuk devisa sektor pariwisata Indonesia tahun 2019 telah mencapai Rp 280 triliun, meningkat 25 persen dari capaian devisa pada tahun 2018, serta dinyatakan telah berkontribusi pada *Product Domestic Bruto* (PDB) nasional sebesar 5,5 persen. Begitu juga demikian dengan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata dinyatakan telah menyentuh angka 13 juta orang atau meningkat sekitar 3,17 persen dari tahun sebelumnya (Kemenparekraf, 2019).

Apabila dilihat secara regional, sektor pariwisata banyak memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat sekitar obyek pariwisata. Penelitian Shantika dan Mahagangga (2018) menyebutkan bahwa perkembangan pariwisata di Pulau Lembongan memberikan dampak terhadap masyarakat lokal dalam hal peningkatan taraf perekonomian masyarakat, perubahan mata pencaharian, serta pendidikan, dan lain sebagainya. Sebelum kehadiran pariwisata, masyarakat pesisir pantai mayoritas berprofesi sebagai petani rumput laut dengan penghasilan Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,- per sekali panen. Sedangkan, setelah pariwisata hadir di sana, masyarakat beralih menjadi pekerja pariwisata dengan penghasilan mencapai Rp 5.000.000,- per bulan. Dalam hal ini, hadirnya industri pariwisata dinilai memberikan pengaruh terhadap profesi masyarakat dan prioritas pendapatan ekonominya. Mayoritas masyarakat di sana kini memiliki kesempatan untuk membuka usaha, baik kuliner atau penginapan, bahkan menjadi *tour guide*. Selain itu, menjadi sebuah kemungkinan juga apabila masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani, kembali menjadi pekerja di bidang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari kedua profesi tersebut. Hanya saja, kedua profesi ini memiliki perbedaan dalam hal prioritas pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, profesi petani memungkinkan masyarakat untuk memilihnya sebagai profesi alternatif, sedangkan menjadi pekerja wisata menjadi profesi yang bersifat prioritas dalam mendukung kehidupan perekonomian masyarakat.

Perkembangan yang terjadi di dalam pariwisata ini menjadi dasar bagi negara dan masyarakat agar semakin produktif dan berusaha dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan bagi perekonomiannya, sehingga dengan hal tersebut, pariwisata mampu secara konsisten menjadi sektor penyumbang devisa negara. Dalam hal ini, pemerintah telah merencanakan berbagai strategi dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan guna dijadikan sebagai landasan bagi daerah dan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif demi pengembangan pariwisata di Indonesia. Atau dengan kata lain, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Melalui undang-undang tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk mandiri dalam hal menciptakan inovasi terhadap produk pariwisata di daerahnya masing-masing. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa masyarakat akan memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya apabila masyarakat itu turut berkontribusi aktif dalam aktivitas kepariwisataan. Kontribusi aktif dan kesempatan yang dimiliki masyarakat sejalan dengan Adikampana (2017), yang menyebutkan bahwa masyarakat lokal merupakan bagian tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata.

Dengan adanya peran serta masyarakat sebagai aktor dalam kegiatan pariwisata, masyarakat memiliki kedudukan sentral dalam hal memajukan suatu destinasi wisata yang akan ditawarkannya kepada wisatawan. Selain kehadirannya yang dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan, pariwisata juga dapat mendorong masyarakat agar mampu menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan, sebab sektor ini merupakan bagian dari mata pencaharian yang dimilikinya. Penelitian Budiyah (2020) mengatakan bahwa penguatan potensi desa dan masyarakat dalam mendukung aktivitas ekonomi kepariwisataan dapat terjadi apabila ada proses penyadaran, pelatihan, dan pendampingan. Tahapan penyadaran dilakukan dengan cara mengubah paradigma berpikir masyarakat terhadap potensi desa dan wilayah sekitarnya, bagaimana

pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Kemudian, tahapan pelatihan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini, peranan pemerintah lebih besar dalam mengajak, menggugah, dan menggairahkan masyarakat untuk turut aktif dalam proses kepariwisataan. Pemerintah bisa memperluas koneksi kerjasamanya terhadap pihak luar, baik dengan lembaga pelatihan hingga perguruan tinggi. Kemudian, tahapan ketiga yaitu pendampingan, di mana tujuannya adalah untuk terus mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa.

Sejalan dengan penjelasan di atas, ditemukan berbagai narasi yang menyatakan bagaimana partisipasi dan kemampuan masyarakat lokal dalam menggerakkan aktivitas kepariwisataan hingga mampu mengelolanya dengan baik. Kondisi ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat lokal telah memiliki pengetahuan yang alami dalam menyusun dan mempersiapkan berbagai skemadan alur yang kemudian akan dijalankan di komunitasnya masing-masing. Kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat ini erat kaitannya dengan manajemen. Menurut Griffin, manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien (Fahmi, 2012:2).

Manajemen pada suatu komunitas dapat melancarkan pekerjaan dan menjadikan kegiatan lebih terarah. Komunitas menggunakan manajemen sebagai media dalam mengorganisir suatu kegiatan dengan tujuan agar kegiatan lebih efektif dan efisien serta tujuan suatu komunitas bisa tercapai. Dalam kerangka pembangunan, Korten (1986) mengemukakan tiga alasan mengapa manajemen sangat penting dilaksanakan sebagai rancangan dasar dalam pembangunan. Pertama, adanya sumber daya lokal (*local resources*) yang secara tradisional yang hanya dimiliki dan mampu dikelola oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat lokal dipandang sudah mampu mengelola lingkungannya, karena mereka telah mewarisi kearifan itu secara turun-temurun. Kedua, adanya tanggung jawab lokal (*local accountability*), artinya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya lebih bertanggung jawab, sebab pengelolaan yang mereka

lakukan secara langsung akan mempengaruhi hidupnya. Keberadaan orang luar dipandang tidak memiliki kedekatan moral dengan masyarakat lokal, oleh sebab itu, orang luar dinilai tidak memiliki tanggung jawab yang sama dengan masyarakat lokal. Ketiga, adanya variasi antar daerah (*local variety*), sehingga daerah yang satu dengan yang lainnya tidak boleh diperlakukan sama dan menuntut adanya sistem pengelolaan yang berbeda (Santosa dan Mahagangga, 2013:8).

Menurut Saraiva (2015), manajemen komunitas dalam industri pariwisata melihat adanya empat hal yang paling sering muncul, yaitu keterlibatan, partisipasi, dukungan, dan manfaat (Tosun, 2000; Saufi et al, 2014). Saraiva (2015) juga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif: dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat pembangunan pariwisata (Timothy, 1999:372). Sejalan dengan itu, menurut Saufi et al (2014) partisipasi masyarakat sebagai tuan rumah berarti sebuah fasilitas untuk mendapatkan keuntungan material dari pariwisata, dan juga melibatkan hak untuk bersuara dalam proses pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, McCommon et al (1990:10) mempertegas bahwa manajemen komunitas pada dasarnya mengacu pada kemampuan masyarakat atau komunitas untuk memiliki tanggung jawab, otoritas, dan pengendalian terhadap arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupannya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab, otoritas, dan kontrol tersebut yaitu: (a) tanggung jawab, yaitu komunitas mengambil alih kepemilikan dan kewajiban untuk sistem, (b) otoritas, yaitu komunitas memiliki hak yang sah untuk membuat keputusan mengenai sistem, (c) pengendalian, yaitu masyarakat mampu melaksanakan dan menentukan hasil keputusannya. Perlu diketahui bahwa manajemen komunitas ini tidak sesederhana menyatakan pilihan apakah pendekatan yang digunakan adalah topdown atau bottom-up. Manajemen komunitas lahir dari berbagai bentuk kolaborasi yang sudah dibangun sejak lama antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga keduanya saling memiliki, memahami, dan menerima perannya masing-masing.

Dalam hal ini, peran manajemen komunitas yang baik dalam hal pengelolaan obyek wisata akan memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata di sebuah daerah. Apabila dikelola dengan baik, maka obyek wisatanya mampu untuk bertahan, namun apabila tidak, bukan hanya obyek wisatanya saja

yang berhenti beroperasi, melainkan masyarakat yang ada di wilayah obyek wisata akan kehilangan mata pencaharian. Penelitian Nengah (2006) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, menyewakan tanahnya kepada operator pariwisata untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik pariwisata serta turut serta memantau dampak-dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata tersebut; *Kedua*, bekerja sebagai karyawan tetap atau paruh waktu di perusahaan operator pariwisata tersebut; *Ketiga*, menyediakan pelayanan jasa kepada operator pariwisata seperti; pelayanan makanan, transportasi, akomodasi dan panduan berwisata (*guidling*); *Keempat*, membentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan pihak swasta, yang mana masyarakat lokal menyediakan lokasi dan pelayanan jasanya sedangkan pihak swasta menangani masalah pemasaran produk dan manajemen perusahaan; *Kelima*, mengembangkan pariwisata secara mandiri dengan mengutamakan pengembangan pariwisata berbasis kemasyarakatan (*community based tourism*). (Waimbo, 2012:21)

Selain melibatkan masyarakat lokal sebagai komunitas yang menjadi pelaku utama di sektor pariwisata, peran pemerintah setempat juga tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan pengelolaan pariwisata. Berbagai upaya pengembangan pariwisata oleh pemerintah setempat dengan didukung oleh partisipasi masyarakatnya menunjukkan bahwa adanya kerjasama skala lokal yang terbentuk dalam hal pengelolaan destinasi wisata yang mereka miliki. Sebagai hasilnya, kedua belah pihak mampu mendatangkan keuntungan bagi dirinya oleh karena proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang ada dilakukan secara kolektif hingga kemudian memperoleh pembagian hasil yang setara.

Wisata Kawasan Kaliadem merupakan obyek wisata yang mendatangkan ribuan wisatawan setiap tahunnya. Dalam hal pengelolaan, obyek wisata ini dikelola secara langsung oleh masyarakat lokal dengan dukungan Pemerintah Desa Kepuharjo. Sebagai lokasi wisata, masyarakat turut berpartisipasi menjadi pengelola obyek wisata dan pelaku usaha. Bermodalkan keadaan geografis alamnya yang masih asri dan alami, sekaligus berdekatan dengan Gunung Merapi, Wisata Kawasan Kaliadem menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Pemerintah Desa Kepuharjo, disebutkan

bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017-2020 di Wisata Kawasan Kaliadem telah mencapai angka hingga 382.998 kunjungan. Tahun 2019 menjadi tahun kunjungan wisatawan terbanyak dengan jumlah 112.647 kunjungan. Jumlah kunjungan yang begitu besar ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa Wisata Kawasan Kaliadem merupakan obyek wisata yang sukses mengundang perhatian wisatawan untuk berkunjung ke sana.

Pergerakan wisatawan yang begitu banyak untuk berkunjung ke Wisata Kawasan Kaliadem memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kemudian konsisten dalam menggerakkan aktivitas kepariwisataan di daerah tersebut. Selain itu, terbukanya kesempatan masyarakat untuk memiliki pekerjaan di sektor pariwisata ini menjadi salah satu bukti bahwa kawasan ini memberikan dampak positif sebagai akibat dari aktivitas kepariwisataannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan pariwisata tidak hanya melibatkan pemerintah lokal saja, namun masyarakatnya juga. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana pemerintah dan masyarakat kemudian mampu merintis kawasan ini hingga mandiri dalam merencanakan tata kelola pariwisatanya secara lokal. Upaya ini menjadi langkah awal bagaimana obyek wisata tersebut menciptakan magnet wisatanya sendiri, hingga kemudian mampu untuk mengelola obyek wisata tersebut dengan baik. Berbagai upaya yang ada tidak hanya memberikan dampak perekonomian bagi pemerintah saja, melainkan masyarakat sebagai pengelola dan pelaku usaha didalamnya juga akan memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Penelitian ini berfokus pada isu manajemen komunitas dalam hal pengembangan pariwisata dengan Wisata Kawasan Kaliadem sebagai obyek penelitiannya. Minimnya penelitian tentang manajemen komunitas melatarbelakangi penulis untuk kemudian menelitinya, sekaligus menjadikannya sebagai topik utama penelitian. Beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya lebih memfokuskan penelitian terhadap keterlibatan, partisipasi, dan dukungan masyarakat terhadap kehadiran sektor pariwisata, dan minim pembahasan tentang bagaimana pengelolaan (manajemen) komunitas dalam pengembangan pariwisata itu sendiri.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penjelasan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan pariwisata di Wisata Kawasan Kaliadem?
3. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan-hambatan selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem?

## C. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengembangan pariwisata lebih memfokuskan pada aspek keterlibatan, partisipasi, dan dukungan masyarakat terhadap kehadiran sektor pariwisata. Dalam hal ini, penelitian dengan topik manajemen komunitas masih jarang ditemukan. Kebanyakan referensi yang ditemukan oleh penulis lebih berbicara tentang konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam hal pengembangan pariwisata. Sedangkan menurut penulis, bukan sebuah hal yang mudah untuk menyatakan bahwa lokasi penelitian penulis adalah bagian dari CBT, sebab dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar kemudian sebuah obyek wisata dapat dikatakan sebagai CBT. Namun bagi penulis, referensi penelitian tentang CBT tersebut sedikit membantu penulis, sebab di dalamnya disinggung mengenai keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal terhadap industri pariwisata. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai referensi guna mendukung penelitiannya:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Ami Suswandi Putra (2013) berjudul *Pola Kemitraan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda*. Metode penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode *grounded research*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik pola kemitraan dalam manajemen atraksi kepariwisataan. Dalam temuan penelitiannya, ada tiga kasus yang diangkat, seperti Kasus Pembangunan Lamin Adat Pemung Tawai, Kasus Penyelenggaraan Upacara Pelas

Tahun, dan Kasus Pengembangan Cinderamata. Pada prosesnya, tahapan perencanaan Pembangunan Lamin Adat Pemung Tawai dipegang oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mengawali inisiasi pembangunan tersebut dengan mengadakan pertemuan informal dalam hal penggalian potensi budaya. Pada tahap pengorganisasian dan pelaksanaan, peran utama dipegang oleh masyarakat. Dominasi masyarakat ini terjadi oleh karena penegasan yang pernah disampaikan oleh masyarakat sejak awal bahwa segala bentuk pembangunan harus dilaksanakan masyarakat itu sendiri. Pada proses ini, pemerintah hanya berperan dalam memberikan bantuan dana dan pengawasan pembangunan. Dalam kasus Penyelenggaraan Upacara Pelas Tahun, tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian mayoritas dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat berperan dalam memberikan ide, menyusun konsep hingga membuat proposal kegiatan. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pihak yang memberikan bantuan dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Terakhir, dalam kasus Pengembangan Cinderamata, dominasi peran dipegang oleh pemerintah. Pengembangan cinderamata ini merupakan program pemerintah sehingga masyarakat hanya berperan sebagai obyek program saja. Pada tahap pengorganisasian, peran terbesar dilakukan oleh pihak masyarakat, mulai dari penentuan pengurus hingga pelaksanaan rapat. Dalam hal ini, pemerintah hanya berperan sebagai pihak yang hanya memberikan sosialisasi awal saja. Pada tahap pelaksanaan, dominasi peran lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Pihak eksternal, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) hanya berperan di dalam penyediaan bahan baku dengan harga yang lebih murah dan pemberlakuan pinjaman modal berbasis sistem simpan pinjam. Selain itu, peran PNPM Mandiri berperan dalam memberi bantuan modal bagi masyarakat pengrajin cinderamata agar dapat meningkatkan hasil produksinya.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topiknya yang menyangkut manajemen dengan pola kemitraan pariwisata sebagai fokus penelitiannya. Selain itu, subyek penelitian juga memiliki kesamaan, yaitu komunitas masyarakat lokal sebagai aktor kepariwisataan. Manfaat yang didapat oleh penulis dari penelitian di atas tentunya membantu penulis dalam menemukan referensi buku, jurnal, dan artikel. Dengan bermodalkan topik

penelitian yang sama tentunya akan memungkinkan penulis untuk kemudian menemukan referensi baru. Selain kesamaan, perbedaan penelitian di atas terletak pada lokasi penelitiannya, di mana lokasi penelitian berada di Wisata Kawasan Kaliadem, sedangkan penelitian terdahulu tersebut lokasi penelitiannya berada di Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. Selain itu, metode penelitiannya juga berbeda, mulai dari jenis penelitian hingga analisis data.

Kedua, penelitian Ratnaningsih dan Mahagangga (2015) berjudul *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu, (1) bentuk partisipasi yang mengawali aktifitas kepariwisataan yaitu masyarakat membuka usaha seperti rumah makan, restoran dan pemandu wisata, (2) bentuk partisipasi proses awal kepariwisataan yaitu masyarakat mulai melakukan musyawarah bersama untuk membicarakan mengenai keinginan mereka terhadap aktivitas pariwisata di desa mereka, (3) bentuk partisipasi dalam perencanaan yaitu pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), pembuatan sarana dan prasarana yang menunjang kepariwisataan dan perencanaan atraksi, (4) bentuk partisipasi dalam pelaksanaan yaitu masyarakat terlibat secara langsung atas pelaksanaan semua perencanaan yang telah direncanakan seperti sarana dan prasarana yang menunjang kepariwisataan dan atraksi, dan (5) bentuk partisipasi dalam pengembangan yaitu memelihara atraksi yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan, promosi melalui *website*, baliho ataupun brosur.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada topik penelitiannya yang menyinggung tentang konsep partisipasi masyarakat lokal. Bagi penulis, partisipasi masyarakat lokal tersebut merupakan bagian dari manajemen komunitas. Berdasarkan kesamaan topik tersebut, maka subyek penelitiannya tentu masyarakat lokal sebagai komunitas. Selain topik dan subyek, kesamaan penelitian Ratnaningsih dan Mahagangga dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitiannya, terutama dalam hal teknik penentuan sampel hingga analisis data dengan deskriptif kualitatif dengan model Milles dan Huberman. Manfaat penelitian yang diperoleh penulis yaitu penulis memiliki gambaran pelaksanaan kegiatan pariwisata di salah satu obyek wisata, dan

berencana menghubungkannya ke dalam penelitian penulis oleh karena penelitian tersebut menyinggung tentang peran masyarakat lokal. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu ada pada topik penelitiannya. Topik penelitian terdahulu yaitu tentang partisipasi masyarakat dengan diikuti konsep CBT, sedangkan penelitian penulis lebih berbicara tentang manajemen komunitas dan tidak mengikutsertakan konsep CBT. Sedangkan untuk lokasi penelitiannya, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali, sedangkan penelitian penulis berada di Wisata Kawasan Kaliadem. Kedua lokasi penelitian ini jelas berbeda sebab penelitian terdahulu lokasi penelitiannya adalah Desa Wisata, sedangkan penelitian penulis tidak berstatus Desa Wisata.

Ketiga, penelitian Widi Safitri (2019) berjudul *Tata Kelola Kepariwisata Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. Metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat yang ada di Kecamatan Masamba khususnya di Desa Lero ini dikelola langsung oleh komunitas pemuda dan BUMDes Maipi Lestari yang dibentuk oleh pemerintah Desa Lero. Penelitian tentang tata kelola kepariwisataan berbasis masyarakat ini menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen oleh Terry (1958) yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengendalian yang merupakan komponen penting yang harus dilakukan pihak terkait dalam pengelolaan kepariwisataan berbasis masyarakat yang ada di Desa Lero. Pengelolaan dengan melakukan perencanaan bersama dalam menciptakan pariwisata yang lebih baik dari sebelumnya tanpa merusak ekosistem alam telah terbentuk sejak dahulu. Tindakan perencanaan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional oleh para aktor dalam upaya pencapaian tujuan bersama.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitiannya yaitu komunitas masyarakat lokal sebagai pengelola obyek wisata. Selain itu, kesamaan penelitian tersebut juga terdapat pada topik penelitiannya yang menggunakan manajemen sebagai teori utamanya. Manfaat yang diperoleh penulis yaitu penulis memiliki gambaran deskripsi mengenai teori manajemen yang

digunakan sesuai dengan topik penelitian terdahulu tersebut. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT), sedangkan penelitian ini tidak berbicara tentang CBT sebab kriteria yang dimiliki CBT tidak seluruhnya ada pada obyek penelitian penulis. Selain itu, untuk lokasi penelitian terdahulu berada di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Wisata Kawasan Kaliadem.

Keempat, penelitian oleh Huda (2020) tentang *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses implementasi dari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dilakukan di Desa Serang melalui pengembangan wisata lokal, sehingga penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah dalam hal pengelolaan pariwisata di Desa Serang dijalankan melalui proses dan skema kerja sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun pelaku usaha lokal, dalam banyak kesempatan peluang investasi. Pengembangan pariwisata juga diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat lokal. Selanjutnya, Pemerintah Desa Serang dan pengelola wisata (swasta) lainnya melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi wisata baru dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pada masyarakat di sekitar lokasi wisata dan masyarakat yang mengembangkan wisata secara mandiri. Selanjutnya, dalam aspek manajemen, meski berawal dan tumbuh dari inisiasi masyarakat desa, sektor pariwisata di Desa Serang dikembangkan melalui pengelolaan yang tertata dengan bertumpu pada aturan dan ketentuan bersama yang mengikat. Selain hal tersebut, terdapat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pengembangan dan evaluasi kegiatan terkait wisata.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terdapat pada topik penelitiannya yang menyangkut manajemen komunitas. Di dalamnya dibahas mengenai pengelolaan pariwisata dan pengembangan pariwisata bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal. Hanya saja, ada perbedaan yang dilihat oleh penulis bahwa

penelitian terdahulu menyertakan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai konsep, sedangkan konsep tersebut tidak ada di dalam penelitian penulis. Adapun perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian pada penelitian terdahulu berada di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian penulis berada di Wisata Kawasan Kaliadem. Adapun manfaat yang didapat oleh penulis dari penelitian di atas tentunya membantu penulis dalam menemukan referensi buku, jurnal, dan artikel.

Kelima, penelitian Pratiwi dan Pinasti (2017) berjudul *Pariwisata dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)*. Metode penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran serta masyarakat lokal dalam mewujudkan desa wisata Kampung Pitu menjadi destinasi wisata berbasis budaya, serta mempelajari dampak kegiatan pengelolaan pariwisata terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Obyek wisata ini memiliki dua potensi utama, yaitu potensi alam dan potensi budaya. Sebagai obyek wisata, pengelolaan pariwisata di Kampung Pitu dikelola dengan sistem kekerabatan dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat lokal. Adapun peran yang terlihat adalah seperti Ketua Pengelola pariwisata sebagai perintis munculnya Kampung Pitu sebagai desa wisata serta pelaku promosi wisata, Ketua RT sebagai penyumbang dana maupun tenaga dalam pembangunan fasilitas serta aksesibilitas, Karang Taruna sebagai pemandu wisata dan manajemen desa wisata, Pokdarwis sebagai pelaksana pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat, Pokdarwis sebagai pelaksana pengembangan desa wisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat. Adanya semangat gotong royong dalam memberikan *good service* kepada wisatawan dan tersedianya forum pertemuan untuk berdiskusi dan menyalurkan aspirasi merupakan beberapa faktor yang mendukung kegiatan pariwisata di Kampung Pitu. Peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata berdampak pada beberapa aspek kultural kehidupan di Kampung Pitu. Munculnya sektor pariwisata di Kampung Pitu berdampak pada berkembangnya sistem pengetahuan masyarakat lokal, munculnya mata pencaharian baru, mengenal keragaman bahasa, sistem peralatan hidup dan

teknologi mengalami kemajuan, serta mulai menyadari pentingnya membentuk organisasi sosial. Sedangkan, dampak negatif yang terjadi yaitu pergeseran nilai budaya gotong-royong di bidang pertanian, munculnya komersialisasi keramahtamahan penduduk lokal, dan munculnya konflik dalam pengelolaan wisata.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada subyek penelitiannya yaitu masyarakat lokal sebagai komunitas dalam proses pengelolaan pariwisata. Selain itu, adapun kesamaan penelitian Pratiwi dan Pinasti dengan penelitian penulis terletak pada teknik analisis data Miles dan Huberman. Manfaat penelitian yang diperoleh penulis melalui penelitian di atas adalah penulis dapat mengetahui bagaimana peran-peran skala lokal dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu yaitu Kampung Pitu, Patuk, Gunungkidul, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Wisata Kawasan Kaliadem. Selain itu, perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu menggunakan konsep pariwisata dan budaya, sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan konsep pariwisata, tanpa konsep budaya.

Adapun kajian pustaka yang berdekatan dengan topik penelitian penulis yaitu terletak pada penelitian Ratnaningsih dan Mahagangga (2015) berjudul *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)*. Dalam hal ini, penelitian tersebut banyak berbicara mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat lokal di dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal metode pengumpulan data, baik dari segi teknik penentuan sampel hingga pada teknik analisis data. Sedangkan untuk keempat penelitian lainnya, penulis hanya mengadopsi beberapa konsep dengan beberapa penjelasan yang ada didalamnya sebagai pendukung deskripsi penelitian penulis. Misalnya, penelitian Ami Suswandi Putra (2013) yang menyertakan peranan manajemen dalam atraksi wisata di Desa Wisata Pampang, Kota Samarinda. Selanjutnya, penelitian Widi Saputri (2019) yang juga menyertakan peranan manajemen dalam mendukung tata kelola pariwisata di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Kemudian penelitian Pratiwi dan Pinasti (2017), penulis mengadopsi konsep peran

masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata di Kampung Pitu, meskipun topik penelitiannya lebih berbicara tentang pariwisata berbasis budaya. Namun, konsep peran masyarakat lokal ini dapat menjadi acuan bagi penelitian penulis. Sedangkan untuk penelitian Rojual Huda (2020), mayoritas berbicara tentang konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yang pada dasarnya tidak digunakan oleh penulis. Namun, penulis dapat mengadopsi konsep keterlibatan masyarakat dalam PEL melalui sektor pariwisata di Desa Serang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Pengembangan Pariwisata dan Partisipasi Masyarakat Lokal**

Menurut Yoeti (2008: 273) pengembangan adalah usaha atau cara yang bertujuan untuk memajukan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan bagaimana keuntungan dan manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata dengan perencanaan yang matang dapat memberi pengaruh dan manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, ataupun budaya.

Selain itu, pengembangan pariwisata menurut Sutiarso (2018:2) yaitu suatu usaha yang dilakukan secara berencana dan terstruktur guna membenahi obyek dan kawasan wisata yang sudah ada sebelumnya dan membangunkannya kembali agar kemudian dipasarkan kepada calon wisatawan. Pengembangan pariwisata pada prinsipnya sama dengan pengembangan produk wisata, yang mana dalam pengembangan produk wisata hendaknya disesuaikan dengan perubahan selera wisatawan yang sangat dinamis. Lebih lanjut menurut Sutiarso, dalam hal pengembangan pariwisata, ada delapan usaha yang perlu dilakukan secara terpadu dan dengan baik, yaitu: (1) promosi untuk memperkenalkan obyek dan kawasan wisata, (2) transportasi yang lancar, (3) kemudahan keimigrasian atau birokrasi, (4) akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman, (5) pemandu wisata yang cakap, (6) penawaran barang-barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar, (7) pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik, (8) kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.

Menurut Palimbunga (2018:194) idealnya pengembangan pariwisata yaitu dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan melibatkan peran pemerintah, serta masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan, menambah pengetahuan masyarakat terhadap pariwisata, dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakatnya.

Dalam proses berlangsungnya pengembangan pariwisata, Zainuri (2012:92) menyebutkan bahwa dari sisi pelaksanaannya, ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, dan industri. Pemerintah memegang peran yang sangat strategis dalam pengembangan pariwisata, yakni sebagai pemegang otoritas wilayah dan politis, terutama dalam masalah pembuatan kebijakan perencanaan fisik dan sosial. Di samping itu pemerintah juga memiliki otoritas untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Sebagai tanggung jawab sosialnya, pemerintah perlu menyediakan berbagai infrastruktur seperti: jalan, air, saluran pembuangan, listrik dan juga fasilitas umum lainnya.

Sejalan dengan Palimbunga, Manafe dan Tanaamah (2003:351) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi. Keberadaan masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai obyek yang menerima segala apa yang diputuskan dari pemerintah, tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam kerangka pengembangan pariwisata. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan menimbulkan perasaan memiliki dan ingin turut memelihara pariwisata di daerahnya.

Menurut Cohen dan Uthoff (1979), ada tiga dimensi utama yang harus diperhatikan dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, yaitu (1) partisipasi apa yang harus dipertimbangkan, (2) siapa yang berpartisipasi, (3) bagaimana partisipasi itu berlangsung. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka untuk menganalisis siapa yang berpartisipasi, Cohen dan Uthoff menyarankan untuk menganalisis siapa yang berpartisipasi, seperti (1) penduduk setempat, (2) pemimpin masyarakat baik secara formal maupun non formal, (3) pejabat pemerintah, (4) orang asing. Sedangkan untuk dimensi bagaimana partisipasi itu berlangsung, maka harus diperhatikan beberapa hal seperti: (1) apakah inisiatif itu datang dari administrator atau penduduk setempat, (2) apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan, (3) struktur partisipasinya, (4)

saluran partisipasinya, (5) durasi partisipasinya, 6) ruang lingkup partisipasinya, 7) pemberian kuasa, yang meliputi bagaimana keterlibatan pengarah pada hasil yang diharapkan (Manafe dan Tanaamah, 2003:351-352).

Minimnya keterlibatan dari masyarakat lokal dalam industri pariwisata akan berdampak pada aspek keberhasilan pariwisata itu sendiri. Wowor (2011:169) menjelaskan bahwa tanpa dukungan masyarakat sekitar, industri pariwisata biasanya tidak bertahan lama, bahkan akan memunculkan masalah yang berkelanjutan (*sustainability*). Dukungan masyarakat sangat tergantung pada partisipasi mereka dalam pariwisata. Dalam hal ini, masyarakat dapat memainkan peran yang strategis, misalnya mereka dapat berperan sebagai pelaku usaha pariwisata, sebagai pengelola usaha pariwisata maupun sebagai penyedia jasa pariwisata. Partisipasi aktif masyarakat setempat sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi wisatawan sehingga kedatangannya benar-benar berkesan. Partisipasi masyarakat akan timbul jika masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pariwisata pada kehidupan mereka (Zainuri,2012:79).

Dari keseluruhan konsep di atas, penulis akan menggunakan konsep dari Sutiarmo. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa ada delapan usaha yang perlu dilakukan sebagai pendukung dalam pengembangan pariwisata. Adapun usaha-usaha tersebut yang perlu dilakukan adalah promosi obyek wisata, transportasi yang lancar, akomodasi yang nyaman, tersedianya pemandu wisata yang cakap, harga barang dan jasa yang wajar dengan mutu terjamin, atraksi yang menarik, dan kebersihan lingkungan hidup. Konsep yang digunakan oleh penulis ini kemudian akan diturunkan ke dalam bentuk poin-poin pertanyaan penelitian.

## **2. Manajemen Komunitas**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Selain itu, kata manajemen dapat disamakan dengan “pengelolaan”, yang berarti pengaturan atau pengurusan (Suharsimi, 1993:31). Menurut Allen (1990), mengelola berarti turut berpartisipasi, yaitu mengatur dan bertanggung jawab atas sesuatu. Dalam hal ini, berpartisipasi berarti mengambil bagian atau berbagi sesuatu (Phil Evans 1992:6).

Sejalan dengan itu, meneruskan pengertian manajemen tersebut, Ricky W. Griffin juga sebelumnya telah mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efektif diartikan bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal (Sulastri, 2012:9).

Menurut Saraiva (2015), manajemen komunitas dalam industri pariwisata melihat adanya empat hal yang paling sering muncul, yaitu keterlibatan, partisipasi, dukungan, dan manfaat (Tosun, 2000; Saufi et al, 2014). Saraiva (2015) juga mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dalam proses pengambilan keputusan dan manfaat pembangunan pariwisata (Timothy, 1999:372).

Menurut Abitona (2014:1), manajemen komunitas merupakan proses strategis yang bersifat bottom-up yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pembuatan kebijakan yang diatasi oleh komunitas lokal untuk menyelesaikan masalah sosial, politik, ekonomi di lingkungan komunitas mereka. Dalam hal ini, masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam proses pembuatan keputusan, pengambilan keputusan, hingga turut menjadi pelaksana atas keputusannya. Hal ini mempertegas bahwa masyarakat akan mandiri dalam menentukan sikapnya terhadap arah pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya. Tacconi L. (2007) menyebutkan bahwa manajemen komunitas telah dijadikan sebagai alternatif dalam mengatur sumber daya lokal. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena masyarakat lokal dapat menilai masalah mereka sendiri dan dapat menyusun aturan dan kebijakan yang tepat dalam mengelola urusan mereka sendiri (Abitona 2014:2).

Korten (1986) mengemukakan tiga alasan mengapa manajemen sangat penting dilaksanakan sebagai rancangan dasar dalam pembangunan. Pertama, adanya sumber daya lokal (*local resources*) yang secara tradisional yang hanya dimiliki dan mampu dikelola oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat lokal dipandang sudah mampu mengelola lingkungannya, karena mereka telah mewarisi kearifan itu secara turun-temurun. Kedua, adanya tanggung jawab lokal

(*local accountability*), artinya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya lebih bertanggung jawab, sebab pengelolaan yang mereka lakukan secara langsung akan mempengaruhi hidupnya. Keberadaan orang luar dipandang tidak memiliki kedekatan moral dengan masyarakat lokal, oleh sebab itu, orang luar dinilai tidak memiliki tanggung jawab yang sama dengan masyarakat lokal. Ketiga, adanya variasi antar daerah (*local variety*), sehingga daerah yang satu dengan yang lainnya tidak boleh diperlakukan sama dan menuntut adanya sistem pengelolaan yang berbeda (Santosa dan Mahagangga, 2013:8).

Manajemen komunitas menurut Pitana (1999:75) disamakan dengan istilah *community based approach* (pendekatan berbasis masyarakat). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat setempat sudah mempunyai kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya dan hal itu diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal tersebut dikenal dengan istilah *traditional knowledge*, *local knowledge*, dan *ethnoscience* harus diperhatikan dalam rangka pembangunan pariwisata yang berwawasan budaya dan lingkungan. Titik dasar aktivitas pengelolaan dalam konsep *community management* dimulai dari masyarakat itu sendiri, yaitu identifikasi kebutuhan, analisis kemampuan, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya yang ada.

Menurut Senyk (2005:2), manajemen komunitas dapat dilihat sebagai bentuk manajemen yang fleksibel, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas. Dengan kata lain, manajemen komunitas memiliki kapasitas untuk secara bersamaan menangani berbagai tujuan pembangunan ekonomi masyarakat, dan konservasi/pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Menurut McCommon et al (1990: 10) manajemen komunitas pada dasarnya mengacu pada kemampuan masyarakat atau komunitas untuk memiliki tanggung jawab, otoritas, dan pengendalian terhadap arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupannya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab, otoritas, dan kontrol tersebut yaitu:

- a. Tanggung jawab, yaitu komunitas mengambil alih kepemilikan dan kewajiban untuk sistem.
- b. Otoritas, yaitu komunitas memiliki hak yang sah untuk membuat keputusan mengenai sistem.

- c. Pengendalian, yaitu masyarakat mampu melaksanakan dan menentukan hasil keputusannya

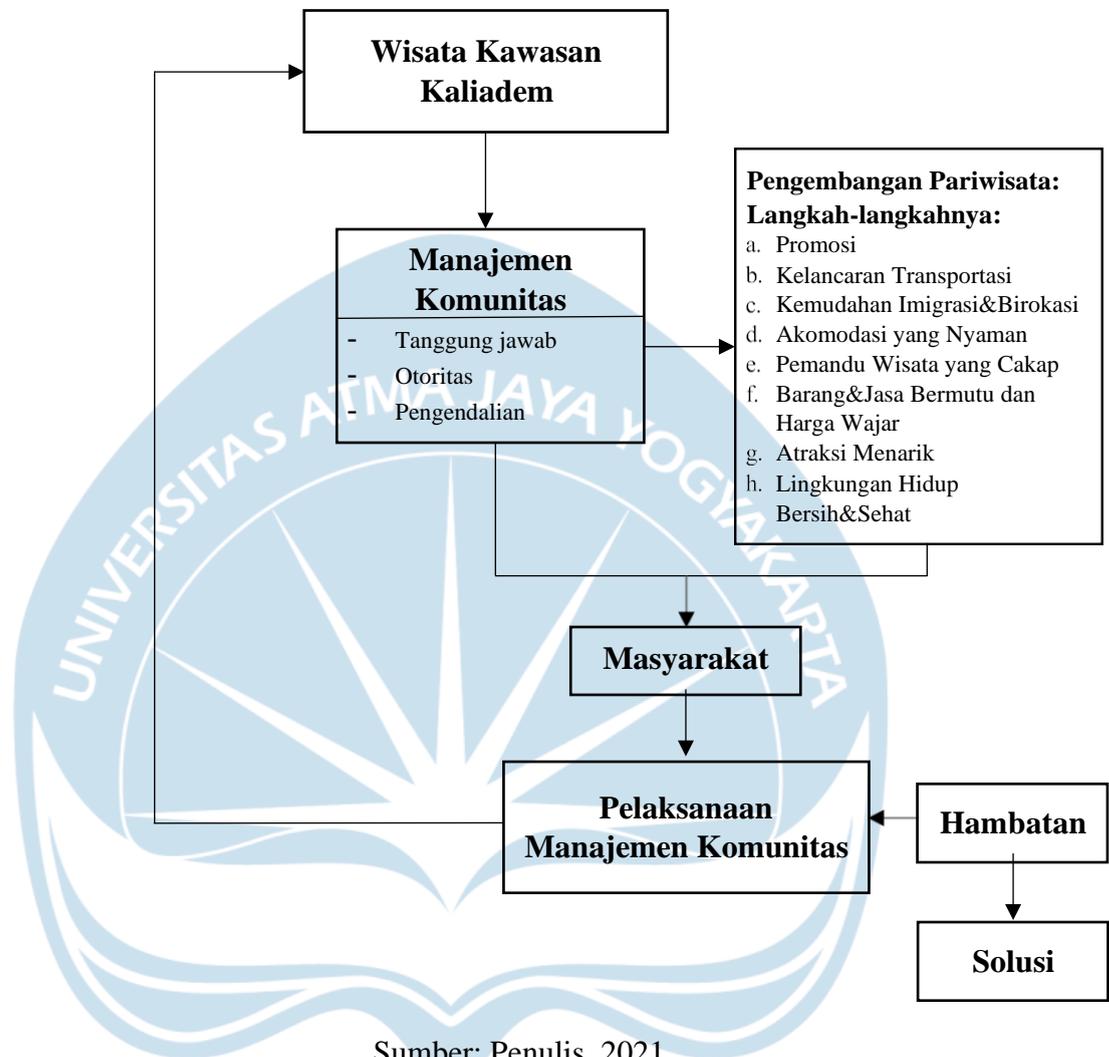
Definisi di atas menjelaskan bahwa manajemen komunitas erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Namun, perlu diketahui bahwa manajemen komunitas ini tidak sesederhana menyatakan pilihan apakah pendekatan yang digunakan adalah *top-down* atau *bottom-up*. Manajemen komunitas lahir dari berbagai bentuk kolaborasi yang sudah dibangun sejak lama antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga keduanya saling memiliki, memahami, dan menerima perannya masing-masing. Jenis hubungan ini jelas akan menempatkan kedua pihak tersebut ke dalam fungsi baru, di mana masyarakat menjadi pusat dalam pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah menjadi pihak yang mendukung kondisi bagaimana keberlangsungan komunitas dapat berjalan dengan baik.

Menurut Brosius et.al (1998), manajemen komunitas dapat dianggap holistik dan integratif karena umumnya dirancang dengan banyak tujuan, berurusan dengan berbagai masalah yang mungkin dan sering dihadapi oleh komunitas yang bersangkutan beradaptasi dan berubah seiring waktu. Hal ini jelas berbeda dengan pendekatan *top-down* yang cenderung dirancang dengan tujuan yang sangat spesifik, yang terkadang bertentangan dengan kepentingan komunitas (Senyk 2005:1).

Dari keseluruhan konsep di atas, penulis akan menggunakan konsep McCommon et al. Dalam hal ini, manajemen komunitas digambarkan sebagai kemampuan masyarakat atau komunitas untuk mengontrol dan menentukan sikap terhadap arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupannya sendiri. Kehadiran manajemen komunitas memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki tanggung jawab, memiliki otoritas dalam membuat keputusan, dan memiliki pengendalian terhadap hasil keputusan yang telah dibuat. Konsep yang digunakan oleh penulis ini kemudian akan diturunkan ke dalam bentuk poin-poin pertanyaan penelitian yang nantinya akan ditanyakan oleh penulis kepada aktor-aktor yang terlibat di dalam sektor pengembangan pariwisata di Wisata Kawasan Kaliadem.

## E. Kerangka Berpikir

Gambar 1: Kerangka Berpikir



Sumber: Penulis, 2021

Wisata Kawasan Kaliadem merupakan kawasan wisata yang menjadi lokasi penelitian penulis. Sebagai kawasan wisata, tentunya ada sekian banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut untuk melakukan perjalanan wisata. Dalam hal ini, manajemen komunitas memiliki kedudukan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata yang ada di Wisata Kawasan Kaliadem tersebut. Ada tiga poin utama yang perlu diketahui dalam manajemen komunitas, yaitu tanggung jawab, otoritas, dan pengendalian. Ketiga poin utama tersebut berhubungan dengan pengembangan pariwisata yang telah disebutkan sebelumnya. Sejalan dengan itu, pengembangan pariwisata memiliki delapan langkah, yaitu promosi, kelancaran

transportasi, kemudahan imigrasi dan birokrasi, akomodasi yang nyaman, pemandu wisata yang cakap, barang dan jasa bermutu dan harga wajar, atraksi menarik, serta lingkungan hidup bersih dan sehat. Dalam hal manajemen komunitas dan pengembangan pariwisata, masyarakat memiliki kedudukan sentral untuk turut terlibat di dalamnya. Penulis juga akan mencoba mencari tahu hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam upaya pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem, serta solusi dari berbagai hambatan yang diatasi oleh pihak manajemen komunitas.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang diatasi oleh pihak manajemen komunitas selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan pariwisata di Wisata Kawasan Kaliadem.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, yaitu Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual/berpikir, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, yaitu Metodologi Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi obyek atau subyek penelitian.
3. Bab III, yaitu Temuan dan Pembahasan yang berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan data, proses pengumpulan data, dan pembahasan dari hasil proses pengolahan data penelitian.
4. Bab IV, yaitu Kesimpulan yang berisi tentang beberapa kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian yang pertanyaan penelitian dan ringkasan berbagai temuan penelitian.